



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 3, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/07/2025
 Reviewed : 01/08/2025
 Accepted : 02/08/2025
 Published : 10/08/2025

Amalia Zata Yumni¹
 Nadira Ayu Maharani²
 Zahra Puspita Eka
 Putri³
 Fisca Putri Rahdiana⁴
 Nazara Dea Ratna
 Putri⁵
 Neneng Yani
 Yuningsih⁶

KEBIJAKAN PEMBATAAN RITASE TRUK SAMPAH DI TPA SARIMUKTI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK DAN EKOLOGI PEMERINTAHAN

Abstrak

Pengelolaan sampah di TPA Sarimukti menghadapi tantangan besar karena volume sampah melebihi kapasitas desain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan kebijakan pembatasan ritase truk sampah (Instruksi Gubernur No.02/PBLS.04/DLH) sebagai langkah transisi menuju sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Studi terpadu ini menganalisis efektivitas kebijakan tersebut dengan mengintegrasikan dua perspektif: teori efektivitas kebijakan publik menurut Riant Nugroho (yang menyoroti lima indikator tepat kebijakan, pelaksana, sasaran, lingkungan, dan proses) dan kerangka ekologi pemerintahan menurut Robi Cahyadi (yang menekankan dimensi *Trigatra* dan *Pancagatra*). Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ini secara tepat kebijakan selaras dengan UU No. 18 Tahun 2008 dan Perda Jabar No. 12 Tahun 2010, serta mempertimbangkan kondisi lingkungan fisik TPA (*Trigatra*). Dari sisi tepat pelaksana, koordinasi antar pemda dan SDM teknis masih menghadapi keterbatasan, menunjukkan kebutuhan pelatihan dan kolaborasi yang lebih baik. Sasaran kebijakan (tepat target) mengarah kepada kelompok penghasil sampah dan institusi pengelola TPA, namun budaya memilah sampah di masyarakat perlu ditingkatkan agar kebijakan berhasil. Indikator tepat lingkungan terpenuhi dengan menurunnya volume sampah masuk (sekitar 18,54% selama periode Ramadan 2024/2025) dan potensi pengurangan risiko longsor, meskipun terbatasnya lahan fisik TPA tetap menjadi kendala. Dari segi tepat proses, proses pembuatan kebijakan bersifat responsif terhadap krisis, namun implementasi di lapangan memunculkan ketimpangan tugas dan belum sepenuhnya didukung edukasi publik. Pendekatan ekologi pemerintahan memperlihatkan bagaimana faktor fisik (*Trigatra*: geografis, SDA, SDM) dan sosial (*Pancagatra*: budaya, ideologi, ekonomi, dsb.) saling berinteraksi dalam kebijakan ini. Kesimpulannya, kebijakan pembatasan ritase di TPA Sarimukti dinilai efektif dalam menurunkan tekanan ekologis dan memperpanjang usia TPA, namun efektivitas penuhnya masih terhambat oleh faktor sosial-budaya dan kapasitas pelaksanaan yang belum optimal. Rekomendasi kebijakan mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah, penguatan kapasitas SDM, serta koordinasi antar lembaga yang lebih baik.

Kata kunci: pengelolaan sampah, TPA Sarimukti, pembatasan ritase, efektivitas kebijakan publik, ekologi pemerintahan.

Abstract

Waste management at the Sarimukti landfill faces major challenges due to excess volume beyond its design capacity. The West Java Provincial Government has implemented a ritase restriction policy for waste trucks (Governor's Instruction No.02/PBLS.04/DLH) as a

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran
amalia23005@mail.unpad.ac.id¹, nadira23001@mail.unpad.ac.id², zahra23009@mail.unpad.ac.id³,
fisca23001@mail.unpad.ac.id⁴, nazara23001@mail.unpad.ac.id⁵, neneng.yani@unpad.ac.id⁶

transitional step toward a sustainable waste management system. This integrated study analyzes the policy's effectiveness by combining two perspectives: public policy effectiveness theory by Riant Nugroho (which emphasizes five indicators: right policy, implementer, target, environment, and process) and government ecology framework by Robi Cahyadi (highlighting Trigatra and Pancagatra dimensions). A qualitative descriptive method was employed, including field observation, interviews, and document analysis. Results show that the policy is right in terms of policy alignment with Law No.18/2008 and West Java Regional Regulation No.12/2010, and it accounts for the landfill's physical environment (Trigatra). In terms of right implementer, intergovernmental coordination and technical human resources still face limitations, indicating a need for better training and collaboration. The right target indicator is met by focusing on waste-generating groups and landfill operators, but public waste sorting practices must improve for full policy success. The right environment indicator is achieved as incoming waste volume has decreased (about 18.54% reduction during Ramadan 2024/2025), reducing ecological strain and landslide risk, although limited landfill space remains an issue. Regarding right process, policy formulation was a responsive crisis measure, yet on-the-ground implementation has revealed uneven task distribution and insufficient public education support. The government ecology approach illustrates how physical factors (Trigatra: geography, natural resources, human resources) and social factors (Pancagatra: culture, ideology, economy, etc.) interact in this policy. In conclusion, the ritase restriction policy at Sarimukti landfill is effective in reducing ecological load and extending the landfill's life, but its full effectiveness is hindered by socio-cultural factors and implementation capacity. Policy recommendations include enhancing community participation in waste segregation, strengthening human resource capacity, and improving inter-agency coordination.

Keywords: waste management, Sarimukti landfill, ritase restriction, public policy effectiveness, government ecology.

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah di wilayah Bandung Raya merupakan tantangan lingkungan yang kompleks karena volume sampah yang terus meningkat. TPA Sarimukti, satu-satunya landfill regional, dengan luas kurang lebih 21,2 hektar, menampung sampah dari Bandung, Cimahi, dan Bandung Barat, dengan timbunan sampah yang sudah melebihi kapasitas dari desain awal. Kondisi kelebihan beban ini menimbulkan masalah lingkungan serius, seperti pencemaran air tanah oleh limbah, risiko longsor, dan polusi udara, terutama setelah insiden kebakaran besar pada TPA Sarimukti tahun 2023. Situasi krisis ini mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah strategis. Sebagai *regulator*, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Instruksi Gubernur No.02/PBLS.04/DLH yang mengatur pembatasan kuota ritase truk sampah dari masing-masing daerah dan melarang pembuangan sampah organik ke TPA Sarimukti. Kebijakan pembatasan ritase ini bertujuan mengendalikan volume sampah masuk agar kapasitas TPA tidak cepat penuh dan meminimalisir dampak ekologis.

Namun, efektivitas kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pembuatan aturan formal. Perspektif ekologi pemerintahan mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara pemerintah dan lingkungannya. Konsep *Trigatra* (lingkungan fisik meliputi aspek geografis, sumber daya alam, dan karakteristik penduduk) dan *Pancagatra* (lingkungan sosial meliputi ideologi, politik, budaya, ekonomi, serta pertahanan-keamanan) menjadi penting karena menentukan bagaimana kebijakan dijalankan dan diterima. Misalnya, faktor geografis terbatasnya lahan TPA Sarimukti dan beban sampah yang tinggi memaksa pemerintah menerapkan ritase untuk menyeimbangkan kapasitas fisik. Sementara itu, nilai sosial-budaya masyarakat terkait sampah dapat mempengaruhi penerimaan kebijakan.

Penelitian ini bertujuan menggabungkan sudut pandang kebijakan publik dan ekologi pemerintahan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pembatasan ritase di TPA Sarimukti secara terpadu. Kerangka teoritis yang digunakan meliputi Teori Efektivitas Kebijakan Publik Riant Nugroho (2020) yang menilai efektivitas melalui lima indikator (tepat kebijakan, pelaksana, sasaran, lingkungan, proses), serta Ekologi Pemerintahan Robi Cahyadi (2021) yang menekankan pengaruh Trigatra dan Pancagatra. Melalui analisis kritis integratif, penelitian ini mengevaluasi seberapa jauh kebijakan ritase sudah memenuhi indikator efektivitas dan adaptif

terhadap lingkungan pemerintahan lokal. Selain itu, penelitian ini juga mendiskusikan interaksi antara aspek hukum, teknis, sosiokultural, dan ekologis dalam konteks kebijakan persampahan di Bandung Raya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Bandung Raya dengan fokus studi kasus pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif proses implementasi kebijakan serta berbagai faktor teknis, sosial, dan kebijakan yang mempengaruhi keberhasilannya dalam konteks nyata. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara di lokasi TPA Sarimukti terkait pelaksanaan kebijakan pembatasan ritase truk sampah.

Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi seperti peraturan daerah, laporan pengelolaan sampah, serta literatur ilmiah yang relevan sebagai landasan teoritis dan untuk memperkuat validitas temuan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti tahapan Miles dan Huberman (1994), yaitu pengumpulan data, reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas, serta penarikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di TPA Sarimukti, yang terletak di Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, dengan karakteristik geografis berupa lereng perbukitan dengan kemiringan antara 16% hingga 25%, serta dikelilingi oleh pegunungan dan punggungan yang berjarak sekitar 200–400 meter dari jalan utama Rajamandala-Bojongmekar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tepat Kebijakan

Menurut pandangan Riant, sebuah kebijakan dianggap tepat jika berhubungan dengan penyelesaian suatu permasalahan. Kebijakan mengenai batasan ritase di Sarimukti dibuat berdasarkan permasalahan penumpukan sampah. Rencana teknisnya mencakup pembangunan Zona 5 serta penetapan kuota harian sekitar 214-223 ritase atau sekitar 1.390-1.500 ton untuk memperpanjang umur TPA. Tindakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 untuk wilayah Jawa Barat yang menetapkan sistem zonasi dan pengurangan sampah. Dengan demikian, kebijakan ini memiliki tujuan yang jelas dan landasan hukum yang kokoh.

Dari aspek operasional, konsep zonasi dan pengurangan TPA dinilai secara teknis cocok untuk menangani penumpukan limbah. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh faktor non-teknis: minimnya pemilahan di lokasi sumber, dampak terhadap layanan setempat, dan keterlambatan dalam pembangunan fasilitas baru. Sebagai contoh, sistem zonasi (aktif, pasif, lindi, gas) yang ditetapkan berdasarkan UU 18/2008 belum berjalan dengan maksimal karena keterlambatan penyelesaian Zona 5 dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, baik konsep politik maupun persyaratan teknis sudah benar, tetapi pelaksanaannya di lapangan memiliki batasan yang mengurangi efektivitasnya.

Tepat Pelaksana

Aspek pelaksana yang tepat menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan harus sesuai dengan jenis kebijakan yang ada (baik yang dijalankan pemerintah, melalui kerja sama, atau oleh satu lembaga). Kebijakan Sarimukti mencerminkan kerja sama yang luas antara berbagai aktor dari sektor publik dan swasta. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat berperan sebagai aktor utama yang merancang dan mengkoordinasikan langkah-langkah kebijakan makro, seperti pembatasan ritase dan pembentukan zona baru. Di sisi lain, kantor LH di tingkat kabupaten/kota (Bandung, Cimahi, KBB) bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis: menetapkan rencana ritase, menjalankan sistem pemilahan lokal, dan melakukan sosialisasi (contohnya, "jika tidak memilah, tidak akan diangkut" untuk rumah tangga). Para staf lapangan, seperti pembersih dan pengemudi truk, harus bekerja lebih keras untuk menyesuaikan diri

dengan kuota baru dan harus merencanakan jadwal. Di TPA, petugas keamanan dan alat berat menjaga agar operasi harian tetap berjalan, terutama saat menghadapi insiden seperti longsor atau kebakaran. Selain itu, pemulung dan koperasi sampah juga berkontribusi secara informal: pemulung melakukan pemilahan sampah organik di malam hari, sedangkan koperasi kecil mengolah sebagian dari sampah organik tersebut menjadi kompos. Kerja sama ini menunjukkan adanya keterlibatan banyak pihak, sejalan dengan prinsip kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam teori Riant.

Namun, pelaksana belum melibatkan semua pihak yang berkepentingan secara menyeluruh. Partisipasi dari sektor swasta yang signifikan, seperti pasar dan industri makanan, masih sangat terbatas. Ini berarti bahwa sumber-sumber limbah utama belum dimasukkan dalam program yang dilaksanakan, sehingga kebijakan tidak menjangkau semua pihak yang menghasilkan sampah. Dalam hal kapasitas, lembaga yang bertanggung jawab (lembaga pemerintah) umumnya memiliki tenaga ahli yang cukup. Namun, mereka masih menghadapi masalah kekurangan dana dan infrastruktur yang mendukung, seperti tempat penampungan sementara (TPS) 3R di daerah. Komunikasi dengan masyarakat juga belum berjalan dengan baik: Meskipun berbagai kampanye telah dilakukan, banyak orang masih belum memahami cara memilah sampah atau belum cukup disiplin. Secara keseluruhan, para pihak yang berkepentingan utama telah dilibatkan dalam pelaksanaan, namun cakupan dan dukungan sumber daya belum merata, yang menimbulkan masalah dalam proses pelaksanaan.

Tepat Sasaran

Tepat sasaran berarti kebijakan tersebut ditujukan kepada kelompok yang benar-benar mengalami masalah. Instruksi Gubernur No. 02/PBLS.04/DLH fokus pada tiga kelompok utama, yaitu pemerintah daerah penghasil limbah, pemerintah kota yang menghasilkan limbah organik, dan manajer TPA Sarimukti. Penentuan kuota pengangkutan per daerah (Bandung sekitar 140 rit, Kabupaten Bandung 40, Cimahi 17, Kabupaten Bandung Barat 17) menunjukkan bahwa upaya ini terkait dengan Undang-Undang Pengendalian Sampah (PEMDA) yang relevan. Begitu juga, pelarangan pembuangan limbah organik diarahkan kepada pemerintah kota sebagai penghasil utama limbah tersebut. Dengan posisi yang strategis ini, prinsip ketepatan sasaran dalam penyusunan kebijakan terjamin.

Namun, pelaksanaan tujuan tersebut belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Laporan dari Walhi Jabar menunjukkan bahwa kendati telah dikeluarkan larangan, volume sampah organik yang dibuang di Sarimukti masih sangat banyak, menandakan bahwa penerapan kebijakan tersebut masih belum berjalan dengan baik. Di beberapa wilayah, pemerintah daerah tidak selalu menerapkan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten dikarenakan kurangnya koordinasi dan perbedaan prioritas, sehingga dampak dari tindakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan. Bahkan di tingkat lokal, pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah organik masih minim, yang menyebabkan proporsi sampah organik di tempat pembuangan akhir tetap tinggi. Dengan kata lain, meskipun secara teori tindakan ini terdengar baik, pelaksanaannya di lapangan tidak efektif akibat kurangnya pengawasan, edukasi kepada publik, dan infrastruktur yang memadai.

Tepat Lingkungan

Aspek *tepat lingkungan* mencakup kesesuaian kebijakan dengan kondisi internal (pelaksana, koordinasi) dan eksternal (dukungan publik, opini). Secara internal, banyak daerah penghasil sampah belum siap secara infrastruktur. Misalnya, beberapa Kab/Kota belum memiliki fasilitas pengolahan organik, sehingga pelarangan organik sulit dijalankan. Hasil survei bahkan menunjukkan Sarimukti masih menerima 300–320 ritase campuran (2.500 ton) per hari, di mana 70 % di antaranya organik yang seharusnya dilarang. Kondisi ini memperjelas lemahnya pemilahan sampah di tingkat sumber dan kendali truk yang lemah, sehingga kebijakan tertulis tampak “tanpa makna” di lapangan. Koordinasi antar-lembaga juga belum optimal: meski Instruksi Gubernur telah diedarkan dan satuan tugas terbentuk, perbedaan prioritas antar daerah dan minimnya pengawasan membuat kebijakan sulit ditegakkan seragam. Singkatnya, aspek lingkungan internal belum kondusif bagi implementasi.

Dari sisi eksternal, dukungan masyarakat juga rendah. Tingkat kesadaran memilah dan mengurangi sampah organik masyarakat Bandung Raya masih minim. Sosialisasi pemerintah dan pemda belum membuahkan perubahan signifikan dalam kebiasaan warga. Komitmen

pemerintah daerah pun belum optimal: beberapa wali kota/bupati belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pengelolaan sampah lokal meski diimbau (misalnya Kota Bandung masih mengirim lebih dari 1.500 ton/hari ke Sarimukti dengan 70 % organik). Media dan LSM telah mengawal isu ini, namun dukungan eksternal sejauh ini belum cukup mengubah kondisi. Dengan demikian, lingkungan pendukung kebijakan baik internal maupun eksternal belum memadai, sehingga dimensi tepat lingkungan belum sepenuhnya terpenuhi.

Tepat Proses

Dimensi tepat proses menilai tahapan implementasi kebijakan (penerimaan, adopsi, kesiapan strategi). Tahap *policy acceptance* masih rendah. Sosialisasi kebijakan pembatasan organik belum menyentuh seluruh masyarakat, terutama pada tingkat rumah tangga sebagai produsen utama sampah organik. Kurangnya komunikasi yang intensif menyebabkan pemahaman warga minim, sehingga terjadi resistensi berupa ketidakpatuhan dan terus terjadinya pembuangan sampah organik. Pemerintah belum membangun legitimasi sosial yang kuat atas kebijakan tersebut.

Tahap *policy adoption* juga belum optimal. Sebagian pemerintah daerah di Bandung Raya belum menyusun peraturan turunan (perbup/perwal) untuk menindaklanjuti Instruksi Gubernur tersebut. Akibatnya, masih banyak truk pengangkut memasuki Sarimukti dengan muatan organik tanpa pemantauan khusus. Belum adanya standar operasional baru dan sistem monitoring yang adaptif menunjukkan lembaga pelaksana belum siap secara struktural dan prosedural menghadapi kebijakan baru. Tanpa adopsi yang konkret, kebijakan provinsi menjadi sulit diimplementasikan di tingkat lokal.

Tahap *strategic readiness* teridentifikasi paling lemah. Banyak daerah belum memiliki fasilitas pengolahan sampah mandiri (insinerator, komposter, RDF) atau unit pengelolaan sampah tingkat RW. Program pemilahan di tingkat rumah tangga belum menyeluruh karena warga belum mendapat sarana atau pendampingan teknis memadai. Koordinasi antar dinas lingkungan hidup provinsi-kabupaten juga belum efektif, mekanisme pengawasan tidak sistematis, dan anggaran pelaksanaan belum mencukupi. Belum adanya evaluasi berbasis data dan insentif/sanksi membuat kebijakan sulit diawasi dan dipertahankan. Secara keseluruhan, kelemahan penerimaan, adopsi, dan kesiapan strategis ini menunjukkan ketepatan proses kebijakan pembatasan ritase masih belum terpenuhi.

Panca Gatra

Kerangka ekologi pemerintahan melihat faktor sosial-budaya salah satu elemen Panca Gatra sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan. Meskipun nilai tradisi lokal Sunda, seperti pamali membuang sampah ke sungai mendukung kepedulian lingkungan, kenyataannya banyak warga Bandung Raya telah mengadopsi budaya pragmatis dan konsumtif. Selain itu, mayoritas responden riset menyatakan membuang sampah ke sungai dianggap penyelesaian cepat. Nilai ekonomi dan kemudahan sering mengalahkan kesadaran kolektif. Instruksi Gubernur yang mengandalkan partisipasi masyarakat menjadi sulit diterapkan jika budaya memilah sampah belum mengakar. Data lapangan pun menunjukkan mobil pengangkut tetap membawa sampah organik tanpa pemeriksaan ketat, mengilustrasikan kesenjangan antara kebijakan formal dan realitas budaya lokal. Singkatnya, nilai-nilai sosial-budaya yang pragmatis dan partisipasi publik yang rendah membuat kebijakan pembatasan ritase cenderung hanya retorika belaka. Pendekatan Pancagatra menuntut strategi pengelolaan sampah mengintegrasikan perubahan budaya seperti edukasi intensif, insentif sosial agar kebijakan teknis dapat berlaku efektif.

Trigatra

Faktor lingkungan fisik (Trigatra) sangat menentukan urgensi kebijakan. TPA Sarimukti secara geografis terletak di Cipatat yang sempit sekitar 25,2 hektar namun menjadi pusat pembuangan sampah Bandung Raya. Akibat lokasi strategis ini, volume sampah yang masuk sangat besar sehingga kapasitas ideal TPA kelebihan hingga 700–800 %. TPA yang berdekatan dengan permukiman juga menimbulkan dampak pencemaran langsung seperti bau limbah air bagi warga sekitar. Selain itu, kondisi hujan lebat dan akumulasi metana di tumpukan menyebabkan beberapa insiden kebakaran TPA tahun 2023.

Karena keterbatasan lahan dan risiko geografis tersebut, pemerintah terdorong menerapkan pembatasan ritase untuk mengendalikan laju sampah agar kapasitas ada dapat dikelola lebih efektif. Kebijakan ini menjadi langkah penting menghindari krisis sampah lebih

parah. Pendekatan trigatra menegaskan bahwa strategi pengelolaan sampah tidak hanya soal teknis, melainkan harus adaptif terhadap kondisi lingkungan fisik yang ada.

Faktor ketiga dalam Trigatra adalah sumber daya manusia (SDM). Kapasitas SDM di tingkat kabupaten/kota berperan krusial dalam respon masalah sampah. Ketika daya dukung SDM belum mampu mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya teknologi rumah tangga, beban pengangkutan dan penimbunan meningkat. Hal inilah yang mendorong lahirnya kebijakan pembatasan ritase misalnya, volume sampah masuk mencapai 1.750 ton/hari melebihi kapasitas ideal 1.000 ton dikarenakan kurangnya pengelolaan hulu sampah. Kebijakan pembatasan ritase merupakan intervensi struktural atas ketidaksiapan SDM lokal mengolah sampah secara mandiri. Pendekatan trigatra menggarisbawahi bahwa kendala SDM menjadi pendorong utama kebijakan pembatasan ini.

Dampak

Kebijakan pembatasan ritase truk sampah ke TPA Sarimukti terbukti berdampak langsung pada penurunan volume sampah yang masuk ke zona aktif. Data menunjukkan bahwa selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2024–2025, volume sampah turun sekitar 18,54%, dari 46.977 ton menjadi 38.270 ton. Penurunan ini membantu mengurangi tekanan fisik pada lahan TPA yang sebelumnya telah kelebihan kapasitas hingga 700–800% dari daya tampung awal. Dari perspektif ekologis, hal ini berkontribusi pada perpanjangan umur zona aktif dan menurunkan risiko bencana lingkungan seperti longsor dan pencemaran lindi. Pembatasan ritase juga mendorong sebagian pemda untuk mempercepat pembangunan tempat pengolahan sampah lokal, sehingga memicu desentralisasi pengelolaan sampah.

Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak sosial dan kelembagaan. Beberapa wilayah mengalami penumpukan sampah sementara akibat keterbatasan kapasitas pengolahan lokal dan minimnya fasilitas pemilahan di sumber. Petugas pengangkutan dan pengelola TPS merasa terbebani oleh perubahan sistem ritase tanpa pelatihan tambahan atau dukungan teknis yang memadai. Selain itu, larangan membuang sampah organik belum sepenuhnya dipatuhi karena rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak positif kebijakan masih bersifat teknis, sedangkan dampak sosialnya memerlukan pendekatan partisipatif dan edukatif yang lebih kuat untuk mendukung keberhasilan jangka panjang.

SIMPULAN

Kebijakan pembatasan ritase truk sampah di TPA Sarimukti telah dirancang dengan tepat secara substansi, berbasis kebutuhan dan regulasi yang kuat. Pendekatan teknis (zona baru, *landfill mining*, pembagian kuota) sesuai untuk mengatasi kapasitas terbatas TPA. Namun, evaluasi indikator efektivitas menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Secara kelembagaan, aktor kunci (provinsi, pemerintah daerah, masyarakat) telah dilibatkan, tetapi koordinasi dan dukungan sumber daya belum sepenuhnya siap. Sasaran intervensi (Pemerintah Daerah dan masyarakat penghasil organik) sudah tepat, tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya penegakan dan rendahnya kesadaran publik. Lingkungan pendukung kebijakan pun belum kondusif, internal kelembagaan belum siap dan infrastruktur terbatas, sedangkan eksternal (dukungan masyarakat, komitmen Pemerintah Daerah) masih kurang. Dari sisi proses kebijakan, penerimaan sosial, adopsi operasional, dan kesiapan strategis semua menunjukkan kekurangan signifikan. Kerangka ekologi pemerintahan menegaskan bahwa faktor fisik dan sosial (Trigatra dan Pancagatra) sangat mempengaruhi hal ini. TPA Sarimukti menghadapi keterbatasan geografis dan SDM yang tinggi, serta budaya lokal yang pragmatis, sehingga kebijakan teknis saja tidak cukup. Dengan demikian, meski kebijakan pembatasan ritase telah tepat secara konsep dan tujuan, keberhasilannya menuntut perbaikan menyeluruh pada implementasi, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat. Rekomendasi mencakup pengembangan infrastruktur pengolahan lokal, pendidikan publik intensif, penerapan regulasi pelaksana di tingkat daerah, serta mekanisme insentif-sanksi agar kebijakan lebih efektif jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., & Hidayatullah, A. F. (2020). Implementasi prinsip good environmental governance dalam pengelolaan sampah di Indonesia. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 8(2), 106-118. <https://doi.org/10.21009/jgg.082.04>
- Agustin, A. (2024). *TPA Sarimukti Kritis, Kota Bandung Gencarkan Pengurangan Residu Sampah*. Infobdg.com. <https://www.infobdg.com/v2/tpa-sarimukti-kritis-kota-bandung-gencarkan-pengurangan-residu-sampah/>
- Ariyani, R. (2024). *Darurat Sampah di Bandung: Kebijakan Mandek, TPA Sarimukti Overload, Masyarakat Cuek*. Pikiran Rakyat. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-018443141/darurat-sampah-di-bandung-kebijakan-mandek-tpa-sarimukti-overload-masyarakat-cuek?page=all>
- Atasi Krisis Sampah di Kota Bandung: Sinergi Pengusaha HORECA, Pemerintah, Swasta dan NGO dalam Implementasi SOP Pengelolaan Sampah – YPBB. (2024, February 2). YPBB. Retrieved June 20, 2025, from <https://ypbb.web.id/atasi-krisis-sampah-di-kota-bandung-sinergi-pengusaha-horeca-pemerintah-swasta-dan-ngo-dalam-implementasi-sop-pengelolaan-sampah/>
- Aurelia, A. (2024, August 14). *Bandung Raya yang Masih Terbelenggu Masalah Sampah*. detikcom. Retrieved June 20, 2025, from <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7489314/bandung-raya-yang-masih-terbelenggu-masalah-sampah>
- Badan Geologi Kementerian ESDM. (2023). *Masa tua Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat*. Badan Geologi. <https://www.geologi.esdm.go.id>
- BandungBergerak.id. (2023, Desember 31). *TPA Sarimukti dikhawatirkan tak sanggup menampung sampah Bandung Raya Januari 2024*. <https://bandungbergerak.id/article/detail/158903/tpa-sarimukti-dikhawatirkan-tak-sanggup-menampung-sampah-bandung-raya-januari-2024>
- BandungBergerak.id. (2024, Januari 2). *Implementasi larangan membuang sampah organik ke TPA Sarimukti masih lemah, Walhi Jabar menyarankan pengetatan pemilahan sampah di kawasan komersial*. <https://bandungbergerak.id/article/detail/1597800/implementasi-larangan-membuang-sampah-organik-ke-tpa-sarimukti-masih-lemah-walhi-jabar-menyarankan-penetatan-pemilahan-sampah-di-kawasan-komersial>
- BAPPEDA Jawa Barat. (2024). *Pemdaprov Batasi Ritase Pengiriman Sampah Ke TPA Sarimukti*.
- Costa, F. M. L. (2024, October 21). *TPA Sarimukti "Overload", Pengolahan Sampah Bandung Raya Belum Optimal*. Kompas.id. Retrieved June 20, 2025, from <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/10/21/tpa-sarimukti-overload-pengolahan-sampah-bandung-raya-belum-optimal>
- Dewan Pengundang Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021, 27 Januari). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82). Diundangkan 2 Februari 2021. <https://ppkl.menlhk.go.id/website/filebox/995/210704055716PERMENLHK%20NO%2001%20TH%202021%20ttg%20PROPER.pdf>
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. (2025, Januari 16). *TPA Sarimukti dibatasi, DLH Kota Cimahi prioritaskan wilayah pemilahan sampah*. PPID Kota Cimahi. <https://ppid.cimahikota.go.id/artikel/dinas-lingkungan-hidup-tpa-sarimukti-dibatasi-dlh-kota-cimahi-prioritaskan-wilayah-pemilahan-sampah>
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. (2023, 18 Desember). *DLH Jabar pastikan TPA Sarimukti tolak sampah tercampur tahun 2024* [Posting artikel]. <https://dlh.jabarprov.go.id/id/post/dlh-jabar-pastikan-tpa-sarimukti-tolak-sampah-tercampur-tahun-2024>
- Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. (2025). *Laporan Pengelolaan Sampah dan Perbaikan Infrastruktur TPA Sarimukti*. Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

- Djabar Pos. (2025). *Zona di TPA Sarimukti diperluas, Bandung tetap tak dapat tambahan jatah ritase pembuangan sampah*. Tribunjabar.id. <https://jabar.tribunnews.com/2025/06/18/zona-di-tpa-sarimukti-diperluas-bandung-tetap-tak-dapat-tambahan-jatah-ritase-pembuangan-sampah>
- dw, p. (2022, June 21). *Pamali: Manifestasi Etik Relasi Manusia dan Lingkungan*. LautSehat.ID. Retrieved June 20, 2025, from <https://lautsehat.id/gaya-hidup/pepep/pamali-manifestasi-etik-relasi-manusia-dan-lingkungan-2/>
- Dwiyanto, A. (2024). *Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Fatimah, S. (2021, Januari 18). *Tangga Seribu, Wisata Hidden Gem yang Memesona di Bandung Timur*. travel.detik.com. <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-5338241/tangga-seribu-wisata-hidden-gem-yang-memesona-di-bandung-timur>
- Fitrat, I. (2023, Agustus 9). *Air Lindi TPA Sarimukti Diduga Cemari Sungai, Ridwan Kamil: Sedang Diselidiki*. rejabar republika. <https://rejabar.republika.co.id/berita/rz3w7g432/air-lindi-tpa-sarimukti-diduga-cemari-sungai-ridwan-kamil-sedang-diselidiki#:~:text=Dalam%20surat%20edaran%20tertulis%2C%20Kota,atau%20257%20ton%20per%20hari>
- Galih, D. (n.d.). *Masyarakat Perlu Di Edukasi Soal Pengelolaan Sampah*. Humas DPRD Jawa Barat. <https://dprd.jabarprov.go.id/berita/290/masyarakat-perlu-di-edukasi-soal-pengelolaan-sampah>
- Hasanah, N. Y., Hidayah, R., & Nababan, R. (2022). Manajemen Pemerintahan Desa Sirnabaya Dalam Meningkatkan Produktivitas Unggulan Bumdesa Jayabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(5), 11-16.
- Hasibuan, A. S. (2019). Peranan ekologi pemerintahan dalam meningkatkan daya saing kebijakan pemerintah daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(1), 33-47. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i1.916>
- Herdiana, I. (2023, September 9). *Lagu Lama Membuang Sampah ke Sungai di Bandung Raya, karena Re...* BandungBergerak.id. Retrieved June 20, 2025, from <https://bandungbergerak.id/article/detail/158765/lagu-lama-membuang-sampah-ke-sungai-di-bandung-raya-karena-regulasi-yang-lemah>
- Humas Jabar. (2022, Juni 13). *Desa Cibiru Wetan Kabupaten Bandung Jadi Percontohan Desa Antikorupsi di Indonesia*. jabarprov.go.id. <https://www.jabarprov.go.id/berita/desa-cibiru-wetan-kabupaten-bandung-jadi-percontohan-desa-antikorupsi-di-indonesia-5880>
- Humas Jabar. (2024, Oktober 5). *Pemdaprov Batasi Ritase Pengiriman Sampah ke TPA Sarimukti*. Bappeda.jabarprov.go.id. <https://bappeda.jabarprov.go.id/pemdaprov-batasi-ritase-pengiriman-sampah-ke-tpa-sarimukti/#:~:text=“Kepada%20warga%20masyarakat%20di%20Bandung,ada%20di%20rumah%2C”%20jalas%20Herman>
- Jaea Barat (BPK). (2024). *Catatan Berita: TPA Sarimukti “overload” [PDF]*. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
- Japan Bank for International Cooperation. (2016). *Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) – PLTU Tanjung Jati B Unit 5 & 6 (2 × 1 070 MW), Jepara, Jawa Tengah [PDF]*. JBIC. https://www.jbic.go.jp/ja/business-areas/environment/projects/image/48649_29.pdf
- Jumantara.id. (2025, 30 Januari). *Alasan Pemprov Jabar lakukan pembatasan pembuangan sampah ke TPA Sarimukti*. Jumantara.id. <https://jumantara.id/berita/detail/alasan-pemprov-jabar-lakukan-pembatasan-pembuangan-sampah-ke-tpa-sarimukti>
- Kabar Jabar. (2024, Mei 7). *KPK RI Monitoring Desa Anti Korupsi Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung*. kabarjabar.net. <https://kabarjabar.net/kpk-ri-monotoring-desa-anti-korupsi-desa-cibiru-wetan-kecamatan-cileunyi-kabupaten-bandung/>
- Kamaludin, H. (2025, February 9). *Kabar Baik, Kuota Pembuangan Sampah dari Bandung ke TPA Sarimukti Akhirnya Ditambah 5 Ritase - Tribunjabar.id*. *Tribun Jabar*. https://jabar.tribunnews.com/2025/02/09/kabar-baik-kuota-pembuangan-sampah-dari-bandung-ke-tpa-sarimukti-akhirnya-ditambah-5-ritase#google_vignette

- Kebakaran TPA Sarimukti: 'Api masih terus membara', ratusan warga menderita ISPA dan iritasi mata. (2023, August 27). *BBC*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2l8vg5wpxno>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa*. Retrieved Mei 27, 2025, from <https://www.panggungharjo.desa.id/wp-content/uploads/2016/03/PERMENDAGRI-No.-1-Tahun-2016-tentang-Pengelolaan-Aset-Desa.pdf>
- Khotimah, N. (2022). Peningkatan Kesiapsiagaan Kader PKK Cibiru Wetan untuk Ketahanan Bencana di Masa Pandemi COVID-19. *JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT*, 7(2), 411-424. <http://jurnal.unmabanten.ac.id/index.php/jppm/>
- Komalasari, T. D. (2025, May 6). *TPA Sarimukti Penuh Sampah, Usianya Tinggal 41 Hari - Ekonomi Sirkular* *Katadata.co.id*. Katadata. Retrieved June 20, 2025, from <https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/68195f3750cf9/tpa-sarimukti-penuh-sampah-usianya-tinggal-41-hari>
- Krisis Sampah TPA Sarimukti*. (2024, October 11). BPK Perwakilan Provinsi JAWA BARAT. Retrieved June 20, 2025, from https://jabar.bpk.go.id/files/2024/11/10_Catatan-Berita-Oktober_2024-TPA_Sarimukti.pdf
- Kurniawan, R. C. (2021). *Ekologi Pemerintahan*. Yogyakarta: Literasi Nusantara Abadi.
- Kusumadewi, L., Putra, A. & Rahman, Y. (2020). *Analisis Potensi Bahaya Longsor di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah: Studi Kasus TPA Sarimukti*. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 26(3), pp.156–165.
- MAWUNTU, P., RARES, J., & PLANGITEN, N. (2022). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO DALAM PENYEBARAN COVID-19 DI DESA WAREMBUNGAN. *Jurnal Adminstrasi Publik*, VIII(113), 111.
- Mitra Aspirasi. (2023, Desember 27). *H. Asep Romy Romaya Calon Anggota DPR RI Jabar 2 Dari PKB Adakan Turnamen Bulutangkis Ber-Aroma Cup Sekecamatan Cileunyi*. *mitraaspirasi.net*. <https://www.mitraaspirasi.net/2023/12/h-asep-romy-romaya-calon-anggota-dpr-ri.html#:~:text=Mitraaspirasi%20%7C%20Kab%20Bandung%20,para%20pencinta%20hobby%20Olahraga%20Bulutangkis>
- Nana, U. (2025, Februari 20). *Gagal Kendalikan Sampah, Walhi Jabar Sebut Instruksi Gubernur Tak Berjalan*. *Lokacita*. <https://lokacita.com/daerah/gagal-kendalikan-sampah-walhi-jabar-sebut-instruksi-gubernur-tak-berjalan/#:~:text=%20disepakati%20mereka%20sendiri%2C%20tegasnya>
- Nguyen, T., & Crossin, E. (2016). Stratific asset management framework and process for local governments. *International Journal of Strategic Property Manageent*, 20(4), 376-390. <https://doi.org/10.3846/1648715X.2016.1210544>
- Nurillah, N. (2025, April 6). *Ritase Dibatasi, Jumlah Sampah di TPA Sarimukti Berkurang Selama Ramadhan*. *Pikiran Rakyat*. <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019217058/ritase-dibatasi-jumlah-sampah-di-tpa-sarimukti-berkurang-selama-ramadhan>
- Operator Desa. (2020, Januari 22). *Wisata Tangga Seribu*. *cibiruwetan.desa.id*. <https://cibiruwetan.desa.id/artikel/2020/1/22/wisata-tangga-seribu#:~:text=Wisata%20Tangga%20Seribu%20merupakan%20wisata,Wetan%2C%20Kabupaten%20Bandung%2C%20Jawa%20Barat>
- Palau, E. L. (2024, Agustus 15). *Implementasi Larangan Membuang Sampah Organik ke TPA Sarimukti Masih Lemah, Walhi Jabar Menyarankan Pengetatan Pemilahan Sampah di Kawasan Komersial*. *Bandung Bergerak*. <https://bandungbergerak.id/article/detail/1597800/implementasi-larangan-membuang-sampah-organik-ke-tpa-sarimukti-masih-lemah-walhi-jabar-menyarankan-pengetatan-pemilahan-sampah-di-kawasan-komersial#:~:text=Tim%20Advokasi%20Sampah%20Walhi%20Jabar,500%20ton>
- Panuntun, B. P., & Kurniati, P. (2023, December 27). *Sampah Organik Dilarang Masuk TPA Sarimukti Per 1 Januari 2024*. *KOMPAS.com*. Retrieved June 20, 2025, from <https://bandung.kompas.com/read/2023/12/27/152603678/sampah-organik-dilarang-masuk-tpa-sarimukti-per-1-januari-2024>

- Pelatihan Optimalisasi Pengelolaan Data menggunakan Google Spreadsheet untuk Ibu-Ibu PKK dan Kader Posyandu di Desa Cibiru Wetan.* (2024, Februari 15). dif.telkomuniversity.ac.id. <https://dif.telkomuniversity.ac.id/en/pelatihan-optimalisasi-pengelolaan-data-menggunakan-google-spreadsheet-untuk-ibu-ibu-pkk-dan-kader-posyandu-di-desa-cibiru-wetan/>
- Pemerintah Desa Cibiru Wetan. (2020, Februari 01). *Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025.* Retrieved Mei 27, 2025, from <https://cibiruwetan.desa.id/index.php/artikel/2020/2/1/perdes-01-tahun-2020-tentang-rpjmdes-2020-2025>
- Pemerintah Desa Cibiru Wetan. (2024). Portal Resmi Desa Cibiru Wetan. Retrieved June 1, 2025, from <https://cibiruwetan.desa.id/>
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2010). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional.* Bandung: Pemprov Jabar.
- PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2016. (n.d.). Peraturan BPK. Retrieved May 31, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111552/permendagri-no-1-tahun-2016>
- Perpustakaan Digital ITB. (2019). https://digilib.itb.ac.id/assets/files/2019/2019_TS_PP_ANGGARA_BAYU_PRATAMA_1-BAB_1.pdf
- Prayoga, R., & Tokan, B. (2025, May 5). *Sekda Jabar sebut usia TPA Sarimukti tinggal 41 hari.* Antaranews. Retrieved June 20, 2025, from <https://www.antaranews.com/berita/4814997/sekda-jabar-sebut-usia-tpa-sarimukti-tinggal-41-hari>
- Primananda, R. J. (2025, Februari 22). *Menteri LH: Tragedi TPA Leuwigajah jadi refleksi tata kelola sampah.* Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/4666505/menteri-lh-tragedi-tpa-leuwi-gajah-jadi-refleksi-tata-kelola-sampah#:~:text=Menurut%20dia%2C%20u ndang,memiliki%20landasan%20hukum%20yang%20jelas>
- Pun, R. (2022, Juli 3). *Cibiru Wetan, Contoh Desa Juara di Jabar.* jabarprov.go.id. <https://www.jabarprov.go.id/berita/cibiru-wetan-contoh-desaja-juara-di-jabar-6109>
- Rahman, F. (2018). *Teori Pemerintahan.* Malang: UB Press.
- Rasyad, R. (2023, September 8). *Warga Bandung Mulai Buang Sampah ke Sungai.* Kumparan. <https://kumparan.com/kumparannews/warga-bandung-mulai-buang-sampah-h-ke-sungai-219HZsIUZv1#>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Retrieved Mei 27, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-6-tahun-2014>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sutrisno, D. (2024). *Walhi Sebut Pemprov Jabar Tak Serius Atasi Sampah di Bandung Raya.* IDN Times Jabar. <https://jabar.idntimes.com/news/jawa-barat/walhi-sebut-pemprov-jabar-tak-serius-atasi-sampah-di-bandung-raya-00-9y7yl-jn4f4m>
- Sutrisno, H., Maharani, Y. & Hidayat, A. (2022). *Leachate Treatment Optimization in Municipal Solid Waste Landfill: Case Study of TPA Sarimukti.* Journal of Environmental Engineering, 18(1), pp.23–34.
- Too, G. E., & Too, L. (n.d.). Asset management in the public sector: The role of strategic planning and management. *International Journal of Quality & Reliability Management.*
- Wibowo, D. & Wahyuni, S. (2021). *Keterkaitan Pemilahan Sampah di Hulu dengan Efektivitas Pengelolaan TPA.* Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan, 7(2), pp.109–118.
- Wijayanto, F., & Susilawati, E. (2023, Desember). *Dampak Sosial Ekonomi Program Pengembangan Pariwisata Tangga Seribudi Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.* Eastasouth journal of Effective Community Services, 2(2), 106-117. <https://ejcs.eastasouth-institute.com/index.php/ejcs/article/view/179/107>
- Wilayah Desa. (2016, Agustus 27). cibiruwetan.desa.id. <https://cibiruwetan.desa.id/index.php/artikel/2016/8/27/wilayah->

- desa#:~:text=Kegiatan%20Pemerintah%20%C2%A0Desa%20Utamanya%20Dilaksanakan, Di%20dalam%20wilayah%20desa%2F%20kelurahan
- YPBB. (2024, 2 Februari). *Atasi krisis sampah di Kota Bandung: Sinergi pengusaha HORECA, pemerintah, swasta dan NGO dalam implementasi SOP pengelolaan sampah*. <https://ypbb.web.id/atasi-krisis-sampah-di-kota-bandung-sinergi-pengusaha-horeca-pemerintah-swasta-dan-ngo-dalam-implementasi-sop-pengelolaan-sampah/>
- Yulianti, A., Ramadhan, F. & Hermawan, D. (2020). *Evaluasi Kinerja Operasional TPA Sarimukti Berdasarkan Prinsip Sustainable Landfill*. Jurnal Rekayasa Sipil dan Lingkungan, 10(4), pp.301–310.
- Zakiyatuddin, Q., Indiana, N. N., & Sarbeni, I. (2023, 06 26). PENGOLAHAN SAMPAH DENGAN TEKNIK LANDFILL DI TPA SARIMUKTI YANG MERUSAK LINGKUNGAN SUNGAI WALUNGAN CIPICUNG DESA SARIMUKTI. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Lingkungan Hidup*, Vol. 8(No. 1). <https://doi.org/10.51544/jkmlh.v8i1.3785>
- Zulhairil, A. (2025). *Zona baru TPA Sarimukti dibuka, Pemprov Jabar tetap batasi sampah Bandung Raya*. IDN Times. <https://jabar.idntimes.com/news/jawa-barat/zona-baru-tpa-sarimukti-dibuka-pemprov-jabar-tetap-batasi-sampah-bandung-raya-00-nqtv-m-9tw0ws>